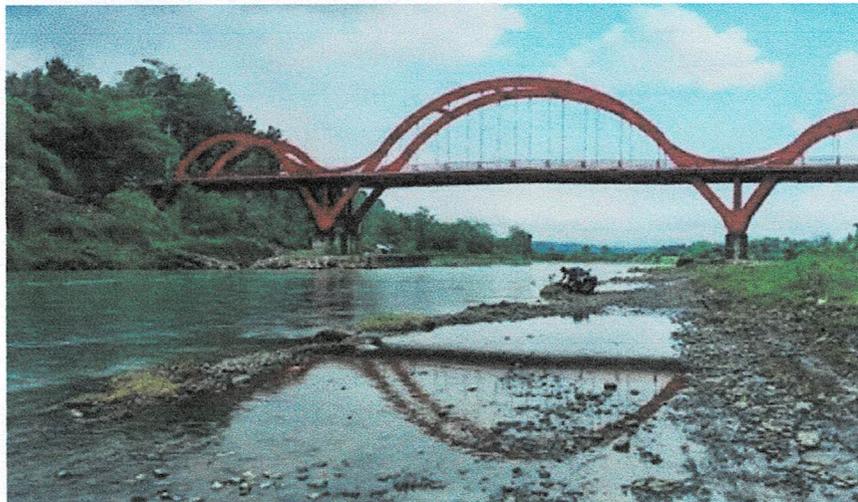




**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Jl. Raya Kaligondang KM. 2 - Telp. (0281) 893158
PURBALINGGA

**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2018**



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, serta selesainya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016–2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021.

Penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga telah banyak berhasil. Laporan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi agar kinerja kedepan lebih baik, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi dalam pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam menyusun Laporan

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dapat selesai.

Purbalingga, Januari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Purbalingga



Ir. SIGIT SUBROTO, MT

Pemimpin Utama Muda

NIP. 196005 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja.....	4
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja.....	4
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Gambaran Umum.....	4
E. Permasalahan utama.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Rencana Strategis.....	12
2.2 Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	19
3.2 Realisasi Anggaran.....	25
BAB IV PENUTUP.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diperjelas dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagai Implementasi dari Sistem Laporan Kinerja yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Instansi Pemerintah. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja atas pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) tahun yang telah berjalan, maka disusun Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 adalah untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2018, dengan

tujuan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rencana kinerja yang telah ditetapkan.

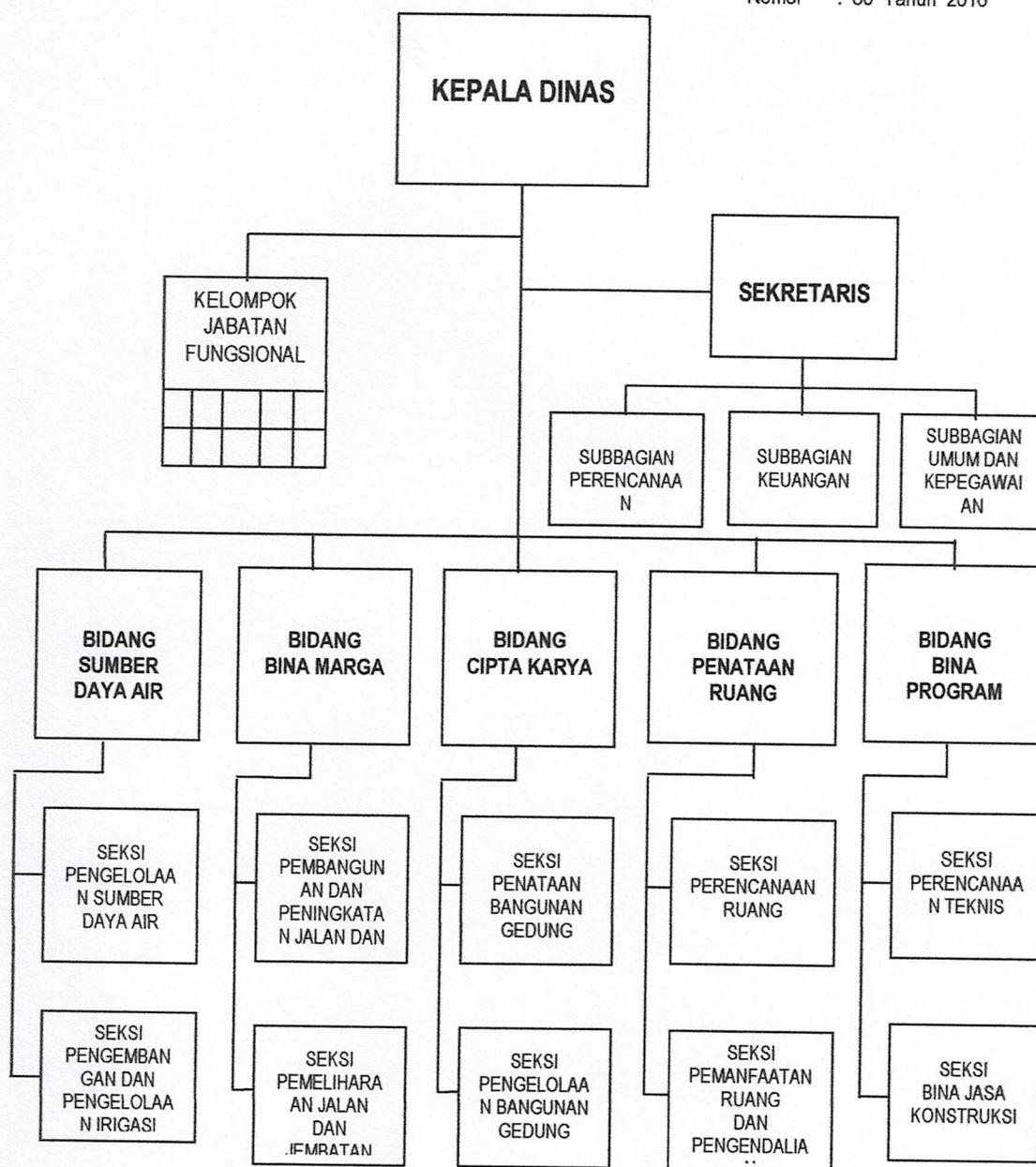
D. Gambaran Umum

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah tipe A, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, DPUPR mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah. Susunan Organisasi DPUPR, terdiri dari :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

Lampiran : Perbup Kabupaten
Purbalingga
Nomor : 80 Tahun 2016



1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi;
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Sumber Daya Air membawahi;
 - a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
4. Bidang Bina Marga, membawahi;
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Cipta Karya membawahi;
 - a. Seksi Penataan Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Pengelolaan Bangunan Gedung.
6. Bidang Penataan Ruang, membawahi;
 - a. Seksi Perencanaan Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Bidang Bina Program, membawahi;
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
8. UPTD;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kondisi Kepegawaian

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga memiliki sumberdaya aparatur pada tahun 2017 sebanyak 146 orang, sebagian besar atau paling banyak ada di Sekretaria yaitu 48 orang dengan personil terbanyak pada alat berat yaitu 24 orang, sedangkan jumlah PNS sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

a. Kepala	:	1 orang
b. Sekretariat	:	48 orang
c. Bidang SDA	:	14 orang
d. Bidang Cipta Karya	:	13 orang
14 Bidang Bina Marga	:	19 orang
15 Bidang Penataan Ruang	:	6 orang
16 Bidang Bina Progra	:	9 orang
17 UPTD	:	36 orang

Jumlah pegawai sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan (Orang)				PTT	Total (Orang)
		I	II	III	IV		
1	Kepala	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	6	8	1	33	48
3	Bidang SDA	-	-	9	1	4	14
4	Bidang Cipta Karya	-	5	5	1	2	13
5	Bidang Bina Marga	-	2	12	-	5	19
6	Bidang Penataan Ruang	-	-	3	2	1	6
7	Bidang Bina Program	-	-	7	-	2	9
8	UPTD	1	20	12	-	3	36
Jumlah		1	32	57	6	50	146

Dari sisi latar belakang pendidikan, sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Purbalingga yang berjumlah 146 orang tersebut cukup beragam. Sebagian besar yaitu sebanyak 71 orang berpendidikan SLTA, berpendidikan sarjana sebanyak 38 orang, berpendidikan SLTP sebanyak 21 orang, pendidikan S-2 sebanyak 6 orang dan berpendidikan SD sebanyak 5 orang. Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Pendidikan

No	Bidang	Pendidikan (Orang)								Total (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	D-II	D III	S-1	S-2	S-3	
1	Kepala	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	2	8	30	-	1	7	-	-	48
3	Bidang SDA	-	-	5	-	-	8	1	-	14
4	Bidang Cipta Karya	-	1	6	-	-	4	2	-	13
5	Bidang Bina Marga	-	-	9	1	2	7	-	-	19
6	Bidang Penataan Ruang	-	-	1	-	-	3	2	-	6
7	Bidang Bina Program	1	-	1	-	-	7	-	-	7
8	UPTD	2	12	19	-	1	2	-	-	36
Jumlah		5	21	71	1	4	38	6	-	146

3. Sarana Prasarana

Perlengkapan dan Peralatan DPUPR Kabupaten Purbalingga :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Lahan Lokasi Perkantoran	12.000,00 M2
2.	Bangunan Perkantoran	2.100,00 M2
3.	Perlengkapan Mobilisasi Alat Berat :	
	a. Mobil Station	7 unit
	b. Mobil Pickup	15 unit
	c. Sepeda Motor	68 unit
	d. Flatbed Truck	1 unit
	e. Dump Truck	12 unit
	f. Armrol Truck	4 unit
	g. Mobil Tanki Air	1 unit
	h. Mobil Sky Lift	2 unit

i. Bulldozer	2 unit
j. Mesin Gilas 2,5 ton	4 unit
k. Mesin Gilas 6/8 ton	9 unit
l. Loader 1,3 m3	1 unit
m. Tronton	1 unit
n. Jeep	1 unit
o. Mobil Aspal Mixer	1 unit
p. Walker	1 unit
q. Kendaraan Roda 3	1 unit

E. Permasalahan utama

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan daerah telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih ada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara maksimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga perlu identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa yang akan datang. Faktor faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi

dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja tahun anggaran 2017 adalah :

1. **BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Gambaran Umum SKPD
 - 1.5 Permasalahan Utama
 - 1.6 Sistematika Penulisan
2. **BAB II PERENCANAAN KINERJA**
 - 2.1 Rencana Strategis
 - 2.2 Perjanjian Kinerja
3. **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
 - 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.2 Realisasi Anggaran
4. **BAB IV: PENUTUP**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 sebagai bentuk aktualisasi janji kampanye yang kemudian disebut sebagai komitmen Bupati dan Wakil Bupati selama masa jabatannya. Sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, terutama di bidang kePUan dan Penataan Ruang, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 mengacu pada visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, yaitu: **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah juga disusun Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam 2016 – 2021, yang dapat mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada Misi yang ke -6 yaitu mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai.

Sasaran

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan

melalui pembangunan pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 adalah mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang handal produktif dan penyelenggaraan aman, berkelanjutan, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah.
- b. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai.
- c. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif.
- d. Meningkatnya Bangunan Gedung Laik Fungsi.
- e. Meningkatnya Layanan Sistem Drainase Perkotaan.
- f. Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas jasa konstruksi.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2018 menjadi tumpuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berisikan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antar atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD).

Perjanjian Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalinggayang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2018. Sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu *mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan.*

Sedangkan indikator kinerja dan targetnya antara lain :

- a. Prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik dengan target yang dingin dicapai sebesar 78,32 persen,
- b. Prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik mempunyai target sebesar 94,00 persen,
- c. Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2017 target yang ingin dicapai sebesar 43,80 persen



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SIGIT SUBROTO, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ.,MM**

Jabatan : PIt. BUPATI PURBALINGGA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Oktober 2018



Pihak kedua,

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ.,MM



Pihak Pertama,

Ir. SIGIT SUBROTO, MT

NIP. 19600531 199003 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan	Prosentase Infrastruktur jalan dalam kondisi baik	Persen	79,6 %
		Prosentase Infrastruktur jembatan dalam kondisi baik	Persen	94,25 %
		Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	45,2 %

No.	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.846.032.000,00	
2	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan	24.626.300.000,00	
3	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	129.617.121.000,00	
4	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan	11.985.220.000,00	
5	Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan	32.665.000.000,00	
6	Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	850.000.000,00	

Purbalingga, Oktober 2018



Pihak Kedua

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ.,MM



Pihak Pertama

Ir. SIGIT SUBROTO, MT

NIP. 19600531 199003 1 007

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan menggambarkan realisasi antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan harus sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Pengukuran kinerja mencakup tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada tahun 2018.

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pada semua kegiatan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan antara target kinerja dengan capaian kerja mengacu pada standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan nilai capaian pada setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, penyampaian informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil suatu penilaian sistematis yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2018 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja pada tahun 2018. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan Pelaporan Kinerja antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mengetahui interpersasi pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

- ✓ > 101 = Amat Baik
- ✓ 80 – 100 = Baik
- ✓ 50 – 79 = Cukup
- ✓ < 49 = Kurang

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target-target dari sasaran indikator kinerja 2018 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018. Dalam melaksanakan (merealisasikan) RKT 2018 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga telah berhasil memenuhi sebahagian besar program dan kegiatan yang ada padatahun 2018. Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realiasasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga tahun 2018, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan Penyelenggara an Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan	Prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik	78,32 %	86,00 %	109,81 %
2		Prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik	94,00 %	96,23 %	102,37 %
3		Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	43,80 %	46,80 %	106,85 %
Rata-rata					106,34

Sesuai dengan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yaitu Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan Penyelenggara an Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan

a. Indikator kinerja prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik.

Capaian kinerja Indikator kinerja prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel seperti dibawah ini.

Tabel 3.2
Infrastruktur Jalan Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2016	Realisasi tahun 2017	Target 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian	Target akhir renstra
1	2	3	4	5	6	7
Prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik	77,56%	84,06 %	78,32 %	86,00 %	109,81 %	82,15%

- Infrastruktur jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 78,32 persen sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 86 persen sehingga capaian kinerjanya mencapai 109,81 persen.
- Pada tahun 2018 infrastruktur jalan dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 78,32 persen sedangkan realisasi yang bisa dicapai sebesar 86 persen, pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 75,77 persen realisasinya sebesar 77,56 persen dan tahun 2017 dengan target sebesar 77,05 persen Realisasinya sebesar 84,06 persen.
- Target Infrastruktur jalan dalam kondisi baik pada tahun 2021 yaitu pada tahun terakhir periode renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016 – 2021 sebesar 82,15 persen sedangkan sampai tahun 2018 realisasinya sudah mencapai sebesar 86 persen sehingga capaian target sudah sebesar 104,68 persen.
- **Kendala** yang dihadapi yaitu panjang jalan Kabupaten yang mencapai panjang mencapai 880 kilometer pada wilayah se Kabupaten Purbalingga pada 18 Kecamatan dan 223 Kelurahan/Desa. **Solusi** yang diterapkan untuk mengatasi pajang jalan Kabupaten yang 880 kilometer dengan cara anggaran pemeliharaan rutin diperbesar agar dapat menjangkau jalan yang rusak terutama yang kerusakannya kurang dari 20 persen selebihnya akan ditangani dengan kegiatan peningkatan jalan, peningkatan kapasitas dan struktur jalan serta pemeliharaan berkala jalan. **Inovasi / strategi** yang diterapkan yaitu dengan memanfaatkan media sosial berupa facebook, twitter dan wibesite matur bupati agar masyarakat dapat segera menginformasikan kerusakan jalan apabila mengetahui diwilayahnya ada kerusakan jalan dengan ketentuan kerusakan tidak lebih dari 20 persen dan dapat ditangani oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan rutin paling lama dalam waktu 1 minggu kerusakan akan ditangani, sedangkan kerusakan diatas 20 persen akan diinventarisir dan diusulkan anggaranya melalui mekanisme yang berlaku.

- Program yang menunjang keberhasilan indikator Infrastruktur jalan dalam kondisi baik yaitu program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan sedangkan kegiatan yang menunjang program dimaksud sebanyak 51 kegiatan.
- b. Indikator kinerja prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik
- Pada tahun 2018 capaian kinerja Indikator kinerja prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel seperti dibawah ini.

Tabel 3.3
Infrastruktur Jembatan Dalam Kondisi Baik

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				
		Realisasi		Realisasi		Target		Realisasi		
		Satuan	%	Satuan	%	Satuan	%	Satuan	%	
1	Panjang Jembatan Kabupaten	2.870,60	m	3.635,40	m	3.635,40	m	3.629,20	m	
2	Baik Sekali	2.756,50	m	3.474,60	m	3.427,28	m	3.492,40	m	96,23
3	Rusak	114,10	m	112,80	m	208,12	m	112,80	m	3,11
4	Rusak Berat	-	m	48,00	m	-	m	24,00	m	0,66
5	Runtuh	-	m	-	m	-	m	-	m	-

- Infrastruktur jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 94 persen sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 96,23 persen capain kinerjanya mencapai 102,37 persen.
- Pada tahun 2018 infrastruktur jembatan dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 94 persen sedangkan realisasi yang bisa dicapai sebesar 96,23 persen ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2016 ditargetkan sebesar 93,5 persen realisasinya yang dicapai sebesar 96,03 persen dan tahun 2017 dengan target sebesar 93,75 persen Realisasinya sebesar 95,58 persen.
- Target Infrastruktur jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2021 yaitu pada tahun terakhir periode renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016 – 2021 sebesar 94,75 persen sedangkan

sampai tahun 2018 realisasinya sudah mencapai sebesar 96,23 persen sehingga capaian target sudah tercapai sebesar 101,56 persen.

- **Kendala** agar jembatan di Kabupaten Purbalingga kondisinya tetap baik pada tahun 2018 ada beberapa kendala antara lain jembatan yang rusak setelah disurvey mengalami kerusakan yang berat sehingga tidak bisa ditangani dengan kegiatan rutin jembatan akan tetapi perlu anggaran besar dan hujan sepanjang tahun 2018 ini mengakibatkan kerusakan jembatan terutama pada sungai yang pada musim penghujan volumenya sangat besar. **Solusi** yang dilakukan agar jembatan Kabupaten kondisinya tetap baik ada beberapa langkah yang telah dilakukan pada tahun 2018 antara lain dengan melakukan survey lapangan dan mengusulkan anggaran sesuai dengan mekanisme penganggaran sehingga jembatan tersebut dapat diselamatkan dan tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. **Inovasi / strategi** untuk mengatasipasi kerusakan jembatan pada musim penghujan ada media facebook, twitter dan wibesite matur bupati sebagai media masyarakat apabila mengetahui ada kerusakan jembatan daerahnya agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.
- Progran yang mendukung keberhasilan indikator kinerja prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik yaitu program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan ada 10 kegiatan yang mendukung agar jembatan kabupaten tetap baik kondisinya

c. Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Capaian Indikator kinerja sasaran ketiga yaitu prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel seperti dibawah ini.

Tabel 3.4
Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2016		Realisasi Tahun 2017		Target Tahun 2018		Realisasi Tahun 2018	
	Jaringan Irigasi	Persen	Jaringan Irigasi	Persen	Jaringan Irigasi	Persen	Jaringan Irigasi	Persen
Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	10.460	40,98	10.720	42,04	11.828,3	43,80	11.922,3	46,80

- Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 43,8 persen sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 46,80 persen capaian kinerjanya mencapai 106,85 persen.
- Pada tahun 2018 indikator prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 43,8 persen sedangkan realisasi yang bisa dicapai sebesar 46,8 persen ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2016 ditargetkan sebesar 40,8 persen realisasinya yang dicapai sebesar 40,98 persen dan tahun 2017 dengan target sebesar 42,3 persen realisasinya sebesar 42,04 persen. Realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 ada kenaikan sebesar 11,32 persen.
- Target indikator prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2021 yaitu pada tahun terakhir periode renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016 – 2021 sebesar 48,2 persen sedangkan sampai tahun 2018 realisasinya sudah mencapai sebesar 46,8 persen sehingga capaian target sudah tercapai sebesar 97,09 persen.
- **Kendala** agar jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2018 ada beberapa kendala antara lain jaringan irigasi yang rusak setelah disurvei mengalami kerusakan yang berat sehingga tidak

bisa ditangani dengan kegiatan rutin irigasi dan perlu anggaran besar dan hujan yang hampir sepanjang tahun 2018 ini mengakibatkan kerusakan irigasi. **Solusi** yang dilakukan agar irigasi kewenangan kabupaten agar kondisinya tetap baik yaitu dengan melakukan survey lapangan dan mengusulkan anggaran sesuai dengan mekanisme penganggaran sehingga irigasi tersebut dapat diselamatkan dan tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. **Inovasi / strategi** untuk mengatasi kerusakan irigasi pada musim penghujan ada media facebook, twitter dan wibesite matur bupati sebagai media masyarakat apabila mengetahui ada kerusakan irigasi daerahnya agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.

- Progran yang mendukung keberhasilan indikator kinerja prosentase irigasi dalam kondisi baik yaitu Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan dan ada 21 kegiatan yang mendukung agar kondisi irigasi tetap baik.

3.2. Realisasi Anggaran

Gambaran analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2018 dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Program	Belanja		Persen tase	Analisis
		Anggaran	Realisasi		
1	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	2,542,726,000	2.292.113.739	90,14 %	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2018 dikarenakan ada sisa realisasi dari kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang menjadi silpa daerah karena sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
2	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan	18,455,178,000	16.342.020.343	88,55 %	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2018 dikarenakan ada sisa realisasi dari Pembangunan eks Kantor Kecamatan Karanjambu karena kendala kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai akhir tahun, sehingga pekerjaan tersebut putus kontrak. Kegiatan penyelesaian keciptakaryaan karena kendala kontraktor tidak melengkapi adminitrasi keuangan sampai akhir tahun kegiatan tersebut belum bisa terbayar
3	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	143,759,586,000	128.986.039.319	89,72 %	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2018 dikarenakan ada sisa realisasi dari kegiatan peningkatan jalan kopral Tanwir kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai akhir tahun, kegiatan pemeliharaan rutin jalan, kegiatan pemeliharaan rutin jembatan, kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan Bojongsari – Kutasari karena kendala kontraktor tidak melengkapi adminitrasi keuangan sampai akhir tahun kegiatan tersebut belum bisa terbayar tetapi pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
4	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan	12,038,244,000	10.094.533.815	83,85 %	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2018 dikarenakan ada sisa realisasi dari kegiatan pada saat penawaran kontrak lebih kecil dibandingkan dengan pagu anggaran sehingga menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

5	Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan	2,573,135,000	2.486.120.850	96,62 %	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2018 dikarenakan ada sisa realisasi dari kegiatan pada saat penawaran kontrak lebih kecil dibandingkan dengan pagu anggaran sehingga menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
6	Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	848,559,000	776.799.300	91.54 %	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2018 dikarenakan ada sisa realisasi dari kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah hal ini terkendala karena revisi Perda RTRW belum jadi sehingga pelaksanaan sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan akhirnya tidak bisa dilaksanakan pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
JUMLAH		180,217,428,000			

- Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.2.542.726.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.2.292.113.739,00 atau sebesar 90,14 persen.
- Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintah dianggarkan tahun 2018 sebesar Rp.18.455.178.000,00 anggaran yang bisa diserap sebesar Rp.16.342.020.343,00 atau sebesar 88,55 persen. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 143.759.586.000,00 sedangkan anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp.128.986.039.319,00 atau sebesar 89,72 persen.
- Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp.12.038.244.000,00 sedangkan anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.090.873.815,00 atau sebesar 83,82 persen.

- Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan pada tahun 2018 mendapat anggaran sebesar Rp.2.573.135.000,00 anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.486.670.850,00 atau sebesar 96,64 persen.
- Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah ditahun 2018 mendapat anggaran sebesar Rp.848.559.000,00 sedangkan anggaran yang dapat diserap sebesar Rp. 776.799.300,00 atau sebesar 91,54 persen. Penyerapan anggaran pada tahun 2018 belum mencapai 89,20 persen hal ini dapat dilihat dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.180.217.428.000,00 sedangkan anggaranyang dapat direalisasinya sebesar Rp. 160.974.517.366,00 atau realisasi anggaran mencapai 89,32 persen.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, yang pelaksanaan kegiatannya pada tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun capaian yang belum optimal dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran – sasaran strategis, sebanyak 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran, telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja tahun 2018 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Purbalingga Tahun 2016 - 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan dari penerapan kebijakan yang

demokratis ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016- 2021 pada Tahun 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SIGIT SUBROTO, MT**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ.,MM**

Jabatan : Plt. BUPATI PURBALINGGA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Oktober 2018



Pihak kedua,

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ.,MM



Pihak Pertama,

Ir. SIGIT SUBROTO, MT

NIP. 19600531 199003 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan	Prosentase Infrastruktur jalan dalam kondisi baik	Persen	79,6 %
		Prosentase Infrastruktur jembatan dalam kondisi baik	Persen	94,25 %
		Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	45,2 %

No.	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.846.032.000,00	
2	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan	24.626.300.000,00	
3	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	129.617.121.000,00	
4	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan	11.985.220.000,00	
5	Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan	32.665.000.000,00	
6	Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	850.000.000,00	

Purbalingga, Oktober 2018



Pihak Kedua

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ.,MM



Pihak Pertama

Ir. SIGIT SUBROTO, MT

NIP. 19600531 199003 1 007